

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KELURAHAN KARTOHARJO 2024

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU		AKIBAT BILA DIBUKA		KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	MANFAAT JIKA DITUTUP	PENGECUALIAN	MANFAAT JIKA DITUTUP		
1	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: a. Dokumen keuangan - SPJ beikut lampirannya dokumen anggaran dan otoritasnya b. Surat Pencairan Anggaran c. Akta Otentik yang bersifat pribadi dan Wasiat d. Memorandum/ surat- surat penting yang perlu dirahasiakan e. Disposisi surat pimpinan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17. - UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	- Selama masih berlaku - Selama masih berlangsung penyelenggaraannya. - Selama status perlindungan masih berlaku	- Menghambat proses penegakan hukum - Mengganggu kepentingan perlindungan hak pribadi - Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi - Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan - dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum - Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi - Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan.			
2	Data Pribadi Penduduk (No KK, NIK) UU No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Th 2006 Tentang administrasi kependudukan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf f - UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2) pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	- Selama masih berlaku - Selama periode penilaian yang ditentukan	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Dapat disalahgunakan Data Pribadi Pegawai	- Melindungi data pribadi seseorang yang bersifat Rahasia - Dapat menjaga Keakuratan & Objektivitas Kepegawaian Melindungi Privasi (data Pribadi PNS)			
3	Daftar Nilai SKP PNS, Penilaian Kinerja / Prestasi Kerja	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf f - O7PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS PP10 Th 1979 tlg penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	- Selama masih berlaku - Selama periode penilaian yang ditentukan	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang PNS - Dapat disalahgunakan Data Pribadi Pegawai	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia - Dapat menjaga Keakuratan & Objektivitas Kepegawaian Melindungi Privasi (data Pribadi PNS)			
4	Keputusan ijin/keterangan tentang penceraian PNS, PP No 10 Th 1983 /Junto PP No 45 Th 1990 tentang ijin Perkawinan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf f - UU No 8 Tahun 74 tentang Perkawinan	- Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijabuti hukuman disiplin aturan, proses perijinan s/d Penjatuhan keputusan	- Dapat mengungkap rahasia Pribadi - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan			

6	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik tanah	- UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	- sampai proses penyelesaian konflik	- dapat menghambat proses penegakan hukum	- membantu kelancaran proses penegakan hukum
7	Usulan Calon Penerima bantuan sosial kemasyarakatan (PKH ,BPNT,BPNTD,Lansia)	- UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h & j - UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 79 Ayat 1	- sampai terbitnya keputusan Walikota	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Mengamankan proses penyusunan kebijakan.
8	Data Obyek Pajak dan Restribusi	- UU No 1 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 40 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	- sampai ada perintah dari penegak hukum yang berwenang	- Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	- Melindungi / mengamankan database objek pajak dan restribusi
9	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	- melindungi rahasia (data kekayaan pribadi)
10	laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit) - Dokumen penawaran pengadaan Barang dan jasa	- UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 31 ayat (1) - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b - Perpres No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas perpres No 16 tahun 2018 - Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah - UU No 30 tahun 2000 tentang Rahasia dagang	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah di audit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
11	Kode / Akses password Aplikasi Elektronik	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE - UU No 11 Pasal 30 Th 2008 tentang ITE pasal 30 ayat 1,2,3	selama kode /password berlaku	penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi & Menjaga Keamanan data dengan baik.

LURAH KARTOHARJO

